

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, peneliti telah melakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta perhitungan alokasi belanja modal dan data IPM yang diperoleh dari BPS Provinsi NTT. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling Method* atau pemilihan sampel dari beberapa populasi yang dinyatakan memenuhi kriteria yakni sebanyak 105 amatan (21 kabupaten/kota dikali 5 tahun). Sehingga dari data tersebut kemudian diolah menjadi data penelitian untuk dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dimuat dalam Bab I.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

a) Sejarah Pembentukan

Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NTT mengangkat Y. S. Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepulauannya menggantikan H. A. Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah NTT termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil. Berdasarkan atas keinginan serta hasrat rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi–delegasi kepada Pemerintah Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.202/1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud dalam

Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950, (Lembaran Negara RIS Tahun 1950 Nomor 59) menjadi tiga Daerah Tingkat I dimaksud oleh Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 64 tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NTT. Daerah Tingkat I NTT meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NTT, maka daerah Swatantra Tingkat I NTT dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II. Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I NTT tertanggal 28 Pebruari 1962 Nomor :Pem.66/1/2 yo tanggal 2 Juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I NTT, maka secara *de facto* mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja–swapraja dihapuskan. Sedangkan secara *de jure* baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I NTT dirubah menjadi Provinsi NTT, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 Nomor 66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan, maka Provinsi NTT dengan 12 daerah tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan

4.555 desa tradisional, yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru. Pada tahun 1996, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II, telah terbentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang sekarang lebih dikenal dengan Kota Kupang. Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Selanjutnya, Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT. Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi NTT. Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi NTT. Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT. Kabupaten Sabu Raijua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT. Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT. Dengan demikian secara keseluruhan, Provinsi NTT hingga tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56

Tahun 2015, Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota, 306 kecamatan, 318 kelurahan dan 2.995 desa.

b) **Ruang Lingkup Wilayah**

Wilayah Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan, dengan luas daratan \pm 47.350 Km² dan luas perairan laut \pm 191.484 ha Km², yang membentang sepanjang 160 Km² dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 Km² dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Timor Leste di Selat Ombai. Secara astronomis, wilayah ini terletak di antara 8⁰-12⁰ Lintang Selatan dan 118⁰-125⁰ Bujur Timur. Wilayah ini meliputi 1.192 pulau (44 pulau dihuni dan 1.148 pulau tidak dihuni).

Provinsi NTT terletak pada bagian terselatan dari gugusan kepulauan Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia. Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Negara Australia);
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Secara keseluruhan gambaran tentang luas wilayah pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Kabupaten/ Kota dan Luas Wilayah

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)
1	Kabupaten Sumba Barat	73.742
2	Kabupaten Sumba Timur	700.500
3	Kabupaten Sumba Barat Daya	144.532
4	Kabupaten Sumba Tengah	181.788
5	Kota Kupang	18.027
6	Kabupaten Kupang	552.583
7	Kabupaten Timor Tengah Selatan	394.700
8	Kabupaten Timor Tengah Utara	266.970
9	Kabupaten Belu	124.894
10	Kabupaten Alor	292.888
11	Kabupaten Lembata	126.639
12	Kabupaten Flores Timur	175.498
13	Kabupaten Sikka	173.191
14	Kabupaten Ende	206.800
15	Kabupaten Ngada	172.224
16	Kabupaten Nagekeo	141.696
17	Kabupaten Manggarai	191.562
18	Kabupaten Manggarai Barat	314.147
19	Kabupaten Manggarai Timur	250.224
20	Kabupaten Rote Ndao	128.441
21	Kabupaten Sabu Raijua	46.047
22	Kabupaten Malaka	116.061
	NTT	4.793.315

Sumber : NTT Dalam Angka Tahun 2017

4.1.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan dan data lainnya yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Analisis ini untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta alokasi belanja modal dan perkembangan IPM

kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

a) **Rasio Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007:142). Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Kupang	9,89	11,75	14,22	14,50	19,82
2	Kabupaten Kupang	5,66	7,15	6,30	6,26	10,44
3	Timor Tengah Selatan	4,33	6,72	7,07	5,98	13,36
4	Timor Tengah Utara	2,96	4,65	4,61	5,22	7,70
5	Belu	7,59	11,97	9,80	9,16	10,55
6	Rote Ndao	3,59	4,80	4,55	4,07	6,63
7	Sabu Raijua	3,85	6,08	6,10	5,64	8,90
8	Alor	4,92	5,80	4,98	4,80	7,72
9	Sumba Barat	5,63	6,79	8,49	8,90	12,31
10	Sumba Timur	5,78	8,00	7,44	6,36	8,83
11	Sumba Tengah	3,93	4,68	4,62	4,09	5,47
12	Sumba Barat Daya	3,37	6,48	6,12	5,19	10,52
13	Lembata	4,80	5,28	4,86	4,83	5,19
14	Flores Timur	4,64	5,96	5,62	4,74	5,36

Lanjutan Tabel 4.2

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
15	Sikka	7,45	9,62	8,85	7,53	11,35
16	Ende	6,13	7,86	6,44	5,96	8,63
17	Ngada	6,19	6,76	6,11	6,04	7,57
18	Manggarai	7,05	9,34	7,79	7,33	11,59
19	Manggarai Barat	6,40	7,50	8,47	10,32	12,16
20	Nagekeo	3,58	4,62	4,55	4,11	6,08
21	Manggarai Timur	3,57	3,70	5,78	5,11	9,36
Rata-Rata		5,30	6,93	6,80	6,48	9,50

Sumber : Data diolah

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi pada Tabel 4.2 kemampuan kontribusi PAD pemerintah kabupaten/kota se-provinsi NTT selama tahun 2013-2017 dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat rata-rata sebesar 6,80% pada tahun 2015 dan 9,50% pada tahun 2017, artinya kontribusi PAD pemerintah kabupaten/kota masih sangat rendah. Hal ini disebabkan pemerintah kabupaten/kota masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Walaupun PAD kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya serta bantuan pemerintah pusat dan provinsi juga semakin besar tidak menunjukkan hal yang signifikan, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih belum bisa menutupi dana transfer dari pusat dan provinsi.

b) **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2007 : 142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Kupang	89,93	88,15	85,37	84,96	79,49
2	Kabupaten Kupang	94,34	93,11	92,94	93,57	86,53
3	Timor Tengah Selatan	95,67	93,17	92,93	94,02	86,01
4	Timor Tengah Utara	89,18	85,97	94,63	94,78	92,30
5	Belu	92,30	87,89	85,10	89,91	89,36
6	Rote Ndao	96,41	95,04	95,45	95,37	93,37
7	Sabu Raijua	96,02	93,92	93,81	94,05	90,98
8	Alor	95,08	94,02	89,04	85,13	90,77
9	Sumba Barat	94,37	93,21	91,51	90,81	86,34
10	Sumba Timur	94,19	91,77	87,93	93,46	90,17
11	Sumba Tengah	96,07	95,32	90,17	88,15	94,53
12	Sumba Barat Daya	96,63	93,28	93,86	94,64	89,32
13	Lembata	95,20	94,52	94,94	95,17	94,22
14	Flores Timur	95,03	93,87	93,56	95,12	91,26
15	Sikka	84,87	90,38	91,15	92,31	88,65
16	Ende	93,87	91,87	93,18	93,90	90,01
17	Ngada	93,81	93,58	87,79	93,86	92,43
18	Manggarai	92,75	90,35	91,98	92,23	86,08
19	Manggarai Barat	93,41	92,24	88,89	89,58	87,69
20	Nagekeo	96,42	95,20	95,43	94,68	93,82
21	Manggarai Timur	96,38	96,18	94,07	93,30	90,38
	Rata-Rata	93,90	92,53	91,61	92,33	89,70

Sumber : Data diolah

Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan pada Tabel 4.3. kemampuan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTT dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat tergantung pada dana ekstern atau bantuan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah kabupaten/kota sangat tinggi, dimana rata-rata tingkat ketergantungan pada tahun

2014 92,53% dan 92,33% pada tahun 2016. Hal positifnya transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berkurang pada tahun 2017 89,70%, namun tidak terlalu menunjukkan hal yang signifikan meskipun dari tahun ke tahun realisasi PAD terus mengalami peningkatan tetapi masih saja didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.

c) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Halim, 2007 : 234). Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{transfer provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Kupang	11,01	13,33	16,65	17,06	24,93
2	Kabupaten Kupang	5,99	7,68	6,78	6,68	12,06
3	Timor Tengah Selatan	4,53	7,22	7,61	6,36	15,53
4	Timor Tengah Utara	3,32	5,41	4,87	5,51	8,34
5	Belu	8,22	13,62	11,52	10,19	11,81
6	Rote Ndao	3,73	5,05	4,77	4,27	7,11
7	Sabu Raijua	4,01	6,48	6,50	6,00	9,79
8	Alor	5,18	6,17	5,59	5,64	8,50
9	Sumba Barat	5,96	7,29	9,28	9,80	14,25
10	Sumba Timur	6,13	8,72	8,46	6,81	9,79
11	Sumba Tengah	4,09	4,91	5,13	4,64	5,79

Lanjutan Tabel 4.4

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
12	Sumba Barat Daya	3,48	6,95	6,52	5,49	11,77
13	Lembata	5,05	5,58	5,11	5,08	5,51
14	Flores Timur	4,88	6,35	6,01	4,99	5,87
15	Sikka	8,78	10,65	9,71	8,16	12,80
16	Ende	6,53	8,59	6,92	6,34	9,58
17	Ngada	6,60	7,23	6,96	6,43	8,19
18	Manggarai	7,60	10,33	8,47	7,95	13,46
19	Manggarai Barat	6,85	8,13	9,53	11,52	13,87
20	Nagekeo	3,72	4,85	4,77	4,34	6,48
21	Manggarai Timur	3,70	3,85	6,15	5,48	10,35
Rata-Rata		5,68	7,54	7,49	7,08	10,75

Sumber : Data diolah

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan pada Tabel 4.4. kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menunjukkan kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten/kota rata-rata pada tahun 2013 5,68% dan 2016 7,08% artinya kemampuan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota masih rendah disebabkan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTT masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi atau dengan kata lain pemerintah kabupaten/kota se-provinsi NTT belum dapat dikatakan otonomi secara nyata.

d) **Alokasi Belanja Modal**

Mardiasmo (2009 : 93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Belanja modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdaftar pada struktur APBD dimana belanja modal merupakan *output* APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 alokasi belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Alokasi Belanja Modal adalah persentase belanja modal dibandingkan dengan total belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Untuk menghitung alokasi belanja modal digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Belanja modal mengarah kepada investasi, yaitu Pegeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset berupa (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta (5) belanja modal fisik lainnya. Dengan investasi yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta (swasta nasional dan asing) kesempatan bisnis bermunculan, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga permintaan mereka akan barang dan jasa meningkat pula, memicu produsen berinvestasi. Pada gilirannya investasi memompa daya beli, sehingga daya beli masyarakat meningkat lagi dan begitu seterusnya. Dengan demikian, meningkatnya investasi akan meningkatkan pendapatan nasional. Demikian pula sebaliknya, apabila investasi menurun, dampaknya adalah menciutnya pendapatan daerah dengan segala kegairahan ekonominya yang memacu antara investasi yang menurun dengan konsumsi yang menurun juga. Tabel berikut ini menggambarkan mengenai perbandingan antara jumlah belanja modal terhadap total belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pada 21 Kab/Kota yang ada di Provinsi NTT.

Tabel 4.5
Perhitungan Alokasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Kupang	12,26	13,63	15,25	20,25	26,48
2	Kabupaten Kupang	15,88	15,56	16,77	29,70	17,51
3	Timor Tengah Selatan	18,92	16,11	15,00	15,82	16,90
4	Timor Tengah Utara	13,33	16,77	19,74	19,18	16,28
5	Belu	17,35	17,86	20,52	23,02	26,43
6	Rote Ndao	22,90	21,58	28,20	29,68	24,66
7	Sabu Raijua	31,80	36,07	47,23	38,90	21,01
8	Alor	17,87	22,02	23,31	21,50	23,34
9	Sumba Barat	28,72	26,42	28,76	35,49	25,69
10	Sumba Timur	26,61	23,45	27,95	30,28	30,71
11	Sumba Tengah	29,79	30,09	36,79	33,24	31,66
12	Sumba Barat Daya	21,04	19,72	30,39	25,02	30,79
13	Lembata	23,79	19,85	18,96	22,09	19,68
14	Flores Timur	13,90	12,46	15,59	16,15	15,58
15	Sikka	14,89	14,00	12,27	17,83	17,48
16	Ende	13,48	16,49	16,74	20,51	19,30
17	Ngada	18,58	17,57	22,37	26,49	32,33
18	Manggarai	24,51	31,36	31,10	26,06	21,59
19	Manggarai Barat	25,51	32,96	26,08	27,65	25,78
20	Nagekeo	20,33	20,16	30,05	31,11	25,82
21	Manggarai Timur	27,92	24,62	25,82	23,47	20,76
Rata-Rata		20,92	21,37	24,23	25,40	23,32

Sumber : Data diolah

Berdasarkan alokasi belanja modal kabupaten/kota se-Provinsi NTT selama tahun 2013-2017 pada Tabel 4.5 terlihat hanya beberapa kabupaten/kota saja yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari alokasi belanja daerah seperti Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat, namun bila dihitung secara rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTT masih berada dibawah 30% (tiga puluh persen), dimana rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-provinsi NTT hanya 20,92% pada tahun 2013 dan 23,32% pada tahun 2017. Artinya total belanja pemerintah daerah kabupaten/kota masih

didominasi oleh belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga daripada belanja modal yang dapat memicu pertumbuhan IPM.

e) **Pertumbuhan IPM**

IPM atau disebut juga sebagai *Human Development Index* (HDI) merupakan sebuah index komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berkecakupan serta mempunyai pendapatan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik/BPS, 2015).

IPM merupakan indikator penting dan bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi yakni : $\geq 80,00$ sangat tinggi, 70,00-79.99 tinggi, 60,00-69.99 sedang dan $\leq 59,99$ rendah. Tabel berikut dapat menjelaskan perkembangan IPM di 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT selama tahun 2013-2017.

Tabel 4.6
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)								
		2013	*(In t	2014	*(Int	2015	*(Int	2016	*(Int	2017
1	Kota Kupang	77.24	0.86	77.58	0.34	77.95	0.19	78.14	0.11	78.25
2	Kabupaten Kupang	61.07	0.73	61.68	0.61	62.04	0.35	62.39	0.4	62.79
3	Timor Tengah Selatan	58.76	0.82	59.41	0.65	59.9	0.47	60.37	0.71	61.08
4	Timor Tengah Utara	59.56	0.52	60.41	0.85	60.96	0.58	61.54	0.49	62.03
5	Belu	59.12	1.54	59.72	0.60	60.54	0.5	61.04	0.4	61.44
6	Malaka	56.14	-	56.94	0.80	57.51	0.78	58.29	0.61	58.9
7	Rote Ndao	57.28	0.72	57.82	0.54	58.32	0.96	59.28	1.23	60.51
8	Sabu Raijua	51.55	1.25	52.51	0.96	53.28	0.88	54.16	1.06	55.22
9	Alor	57.52	1.05	58	0.48	58.5	0.49	58.99	0.62	59.61
10	Sumba Barat	60.55	0.92	60.9	0.35	61.36	0.5	61.85	0.45	62.3
11	Sumba Timur	61.44	0.55	62.04	0.6	62.54	0.68	63.22	0.97	64.19
12	Sumba Tengah	57.25	0.59	57.6	0.35	57.91	0.61	58.52	0.87	59.39
13	Sumba Barat Daya	59.26	1.04	59.9	0.64	60.53	0.78	61.31	0.15	61.46
14	Lembata	60.56	1.05	61.45	0.89	62.16	0.65	62.81	0.28	63.09
15	Flores Timur	59.8	0.87	60.42	0.62	61.24	0.66	61.9	0.99	62.89
16	Sikka	60.84	0.72	61.36	0.52	61.81	0.61	62.42	0.66	63.08
17	Ende	64.64	0.71	65.25	0.61	65.54	0.2	65.74	0.37	66.11
18	Ngada	64.43	0.86	64.64	0.21	65.1	0.51	65.61	0.86	66.47
19	Manggarai	59.49	0.57	60.08	0.59	60.87	0.8	61.67	0.57	62.24
20	Manggarai Barat	59.02	0.89	59.64	0.62	60.04	0.59	60.63	1.02	61.65
21	Nagekeo	62.24	0.64	62.71	0.47	63.33	0.6	63.93	0.81	64.74
22	Manggarai Timur	55.74	0.46	56.58	0.84	56.83	0.67	57.5	1.01	58.51
Provinsi NTT		61.68	0.58	62,26	0.41	62,67	0.46	63,13	0.60	63,73

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.6. perkembangan IPM di kabupaten/kota se-provinsi NTT selama periode 2013-2017 terus mengalami fluktuatif, dimana perkembangan IPM tertinggi ada pada Pemerintah Kota Kupang yakni sebesar 77,24% pada tahun 2013 dan 78,25% pada tahun 2017 dan perkembangan IPM terendah ada pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yakni sebesar 55,74% pada tahun 2013 dan 58,51% pada tahun 2017. Namun bila dihitung rata-rata secara keseluruhan perkembangan IPM di 22 kabupaten/kota pada tahun 2013 sebesar 61,68% dan 63,73% pada tahun 2017. Hal ini menempatkan Provinsi NTT dengan perkembangan IPM pada klasifikasi sedang. Tentunya peran pemerintah kabupaten/kota melalui alokasi belanja modal ikut serta dalam mempengaruhi perkembangan IPM di Provinsi NTT sebagaimana yang dikemukakan oleh

Mardiasmo (2009 : 93) bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

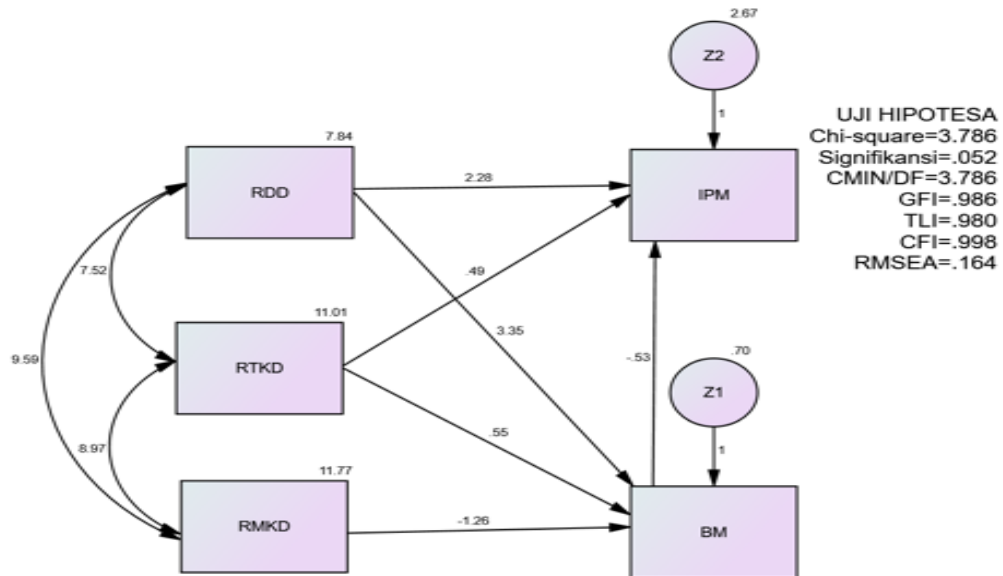
IPM yang tinggi tentu ditunjang dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan juga meningkatkan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

4.1.3 Analisis Statistik Inferensial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya untuk analisis dengan *Structural Equation Modelling (SEM)* bertujuan untuk pengujian hipotesis. Model penelitian ini digambarkan pada Kerangka Pikir Teoritis pada Bab II, seterusnya dilakukan uji kesesuaian/kelayakan model.

a) Analisis *Structural Equation Modeling (SEM)*

Analisis selanjutnya adalah analisis *Structural Equation Model (SEM)* secara *full model*. Analisis hasil pengolahan data pada tahap *full model SEM* dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Hasil pengolahan data untuk *full model SEM* ditampilkan pada gambar dan tabel berikut :



Gambar 4.1
Hasil Uji *Structural Equation Model (SEM)*

Uji terhadap kelayakan *full model* SEM ini diuji dengan menggunakan Chi square, GFI, CFI, TLI, CMIN/DF dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan, meskipun AGFI diterima secara marginal, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Kelayakan Model, *Structural Equation Model (SEM)*

<i>Goodness of fit Indeks</i>	<i>Cut-off Value</i>	Hasil Analisis	Evaluasi Model
<i>Relative Chi- Square</i>	Kecil (< 32,67)	3,786	Baik
<i>Signifikansi</i>	$\geq 0,05$	0,052	Baik
<i>RMSEA</i>	< 0,08	0,164	Marginal
<i>GFI</i>	$\geq 0,90$	0,986	Baik
<i>TLI</i>	$\geq 0,95$	0,980	Baik
<i>CMIN/DF</i>	≤ 3	3,786	Marginal
<i>CFI</i>	$\geq 0,95$	0,998	Baik

Sumber : Data Primer Diolah, Lampiran 5

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai telah memenuhi atau Good Fit, meskipun nilai RMSEA dan CMIN/DF masih marginal tetapi masih dapat diterima. Selanjutnya dilakukan uji statistik dan hipotesis dari variabel Indeks Pembangunan Manusia, Alokasi Belanja Modal, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan dan Rasio Derajat Desentralisasi sebagai berikut :

b) Pengujian Hipotesis

Setelah semua asumsi terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana diajukan pada bab sebelumnya. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dari suatu hubungan kausalitas antar variabel. Berikut hasil pengolahan SEM :

Tabel 4.8
Pembobotan Regresi SEM

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
BM <--- RDD	3.347	.621	5.393	***	
BM <--- RTKD	.549	.051	10.864	***	
BM <--- RMKD	-1.261	.484	-2.607	.009	
IPM <--- BM	-.531	.185	-2.873	.004	
IPM <--- RTKD	.488	.141	3.455	***	
IPM <--- RDD	2.284	.335	6.815	***	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Lampiran 5

a) Pengujian Hipotesa 2

H2 : Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05. Peranan langsung rasio derajat desentralisasi terhadap IPM adalah 2,284.

Dengan demikian rasio derajat desentralisasi lebih berperan terhadap IPM.

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif

secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

b) Pengujian Hipotesa 3

H3 : Rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio ketergantungan keuangan terhadap IPM adalah 0,488. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan berperan terhadap IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

c) Pengujian Hipotesa 4

H4 : Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal adalah 3,347. Dengan demikian rasio derajat desentralisasi berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

d) Pengujian Hipotesa 5

H5 : Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal adalah 0,549. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan daerah berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.

e) Pengujian Hipotesa 6

H6 : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,009 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal adalah -1,261. Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

f) Pengujian Hipotesa 7

H7 : Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap IPM

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,004 atau < 0.05 . Peranan langsung alokasi belanja modal terhadap IPM adalah -0,531.

Dengan demikian belanja modal berperan terhadap IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh diterima.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, baik dengan analisis statistik deskriptif maupun dengan analisis statistik inferensial dalam kaitannya dengan teori-teori yang menjadi landasan teoritis, maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap IPM

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio derajat desentralisasi terhadap IPM adalah 2,284. Dengan demikian rasio derajat desentralisasi lebih berperan terhadap IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) dengan judul penelitian “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Sumatera Bagian Tengah”, menyatakan Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga dengan hasil penelitian Kusuma (2016) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah” dan memperoleh hasil bahwa tingkat rasio desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mahmudi (2007) mengemukakan bahwa derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, dimana peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting dan bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Terhadap IPM

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio ketergantungan keuangan terhadap IPM adalah 0,488. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan berperan terhadap IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan

berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika (2015) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia” dan memperoleh hasil bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil, yang sama juga diperoleh dari penelitian Dwiandari (2018) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia” dan hasilnya adalah rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif pada belanja daerah dan indeks pembangunan manusia.

Hidayat (2013) menyatakan bahwa bahwa rasio ketergantungan keuangan yang rendah dapat meningkatkan belanja modal. Dengan demikian daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang terendah dinilai mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Belanja modal yang tinggi mampu meningkatkan IPM suatu daerah (Sari dan Supadmi, 2016).

3. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal adalah 3,347. Dengan demikian rasio derajat desentralisasi berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio

derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Jatitmas (2015) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”, dimana hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari rasio derajat desentralisasi terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Anggraini (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi, dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur” dan hasilnya juga menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Mahmudi (2010 : 142) menyatakan bahwa derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran secara langsung melalui alokasi belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

4. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal adalah 0,549. Dengan demikian rasio ketergantungan keuangan daerah berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Jatitmas (2015) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”, dimana hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari rasio ketergantungan terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Martini (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali” dan hasilnya juga menyatakan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

Mahmudi (2010 : 142) menyatakan semakin rendah ketergantungan keuangan daerah berarti pemerintah kabupaten/kota mampu membiayai sendiri pengeluaran daerah yang secara langsung dirasakan masyarakat dan mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat baik terhadap barang konsumsi maupun non konsumsi. Lebih lanjut (Halim, 2007) menyatakan

kinerja keuangan daerah yang baik ialah memiliki tingkat ketergantungan serendah mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber daya utama yang harus didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

5. Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,009 atau < 0.05 . Peranan langsung rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal adalah -1,261. Dengan demikian rasio kemandirian keuangan daerah berperan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Indratno (2016) yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, dimana hasil yang diperoleh adalah rasio kemandirian daerah dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Anggraini (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi, dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur” dan hasilnya juga menyatakan bahwa rasio kemandirian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang positif.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa kemandirian setiap daerah berbeda, sesuai dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka pemerintah daerah

memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengalokasikan dana untuk membangun daerahnya melalui alokasi belanja modal sehingga alokasi belanja modal meningkat.

6. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap IPM

Berdasarkan hasil pembobotan regresi SEM, nilai probabilitas sebesar 0,004 atau < 0.05 . Peranan langsung alokasi belanja modal terhadap IPM adalah -0,531. Dengan demikian belanja modal berperan terhadap IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Azahra (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi”, dimana hasil yang diperoleh adalah Alokasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Demikian juga dengan penelitian dari Sari (2016) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia” dan hasilnya adalah belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Halim (2002) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang bersingungan langsung dengan pelayanan publik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat ialah melalui IPM (BPS, 2017). Dengan demikian peran pemerintah dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk belanja modal dapat berpengaruh terhadap IPM.